

EDISI
APRIL 2009

ISSN : 0853-7488

REFLEKSI HUKUM



Jurnal Ilmu Hukum

**PERKEMBANGAN-PERKEMBANGAN
MUTAKHIR DALAM HUKUM INDONESIA**
(Recent Developments in Indonesian Law)

Artikel:

**MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAM:
MASALAH PIDANA MATI**
A. Mukthie Fadjar

**PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**
Arie Siswanto

**IMPLEMENTASI LISENSI WAJIB
TERHADAP PRODUK OBAT YANG
DIPATENKAN PASCA DEKLARASI DOHA**
Tomi Suryo Utomo

**PERAN OMBUDSMAN DALAM
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI WARGA MASYARAKAT**
Kustadi

**HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI
TERJADINYA KASUS KORUPSI
PENGADAAN BUKU AJAR TAHUN 2003 DI
KOTA SALATIGA DAN PENANGANANNYA**
M. Haryanto

Timbangan Buku :

**PERADILAN KONSTITUSI DI SEPULUH
NEGARA**
Titon Slamet Kurnia

Fakultas Hukum
UKSW



REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

ISSN 0853 – 7488

**Penanggungjawab
Dekan**

Ketua Dewan Redaksi

Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H.

Anggota Dewan Redaksi

Kustadi, S.H., M.Hum.

Arie Siswanto, S.H., M.Hum.,

Dr. Tri Budiyo, S.H., M.Hum.,

Christiana Tri Budhayati, S.H., M.Hum.

Yakub Adi Krisanto, S.H., M.H.

Sekretaris

Indirani Wauran, S.H.

Mitra Bestari

Theofransus Litaay, S.H., LL.M

Alamat Redaksi

Fakultas Hukum UKSW

Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711

Phone 0298 – 321212 ext. 245

Fax 0298 – 321433

E-mail: refleksihukum@yahoo.com

Redaksi menerima sumbangan karangan tentang hukum sebanyak maksimal 15 halaman kuarto spasi satu setengah. Redaksi dapat menyunting dan memadatkan karangan. Jika suatu karangan dimuat tidak berarti redaksi sependapat dengan penulisnya.

Terbit setiap semester pada bulan April dan Oktober



DAFTAR ISI

Editorial		iv
	12030093	
Artikel		
Mahkamah Konstitusi dan HAM: Masalah Pidana Mati A. Mukthie Fadjar		1
Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional Arie Siswanto		7
Implementasi Lisensi Wajib terhadap Produk Obat yang Dipatenkan Pasca Deklarasi Doha Tomio Suryo Utomo		21
Peran Ombudsman dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Warga Masyarakat Kustadi		41
Hal-hal yang Mempengaruhi Terjadinya Kasus Korupsi Pengadaan Buku Ajar Tahun 2003 di Kota Salatiga dan Penanganannya M. Haryanto		57
Timbangan Buku		
Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara Titon Slamet Kurnia		67

EDITORIAL

Sama seperti bidang-bidang ilmu yang lain, ilmu hukum juga memiliki dinamika. Dari waktu ke waktu ilmu hukum mengalami banyak perkembangan. Perkembangan itu meliputi: (1) *perubahan-perubahan yang terjadi di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum bagi praktik hukum*; (2) *interpretasi-interpretasi terbaru terhadap peraturan perundang-undangan yang ada yang dilakukan oleh kalangan praktisi hukum (terutama yang otoritatif adalah oleh hakim dalam bentuk putusan pengadilan)*; (3) *maupun interpretasi-interpretasi yang dilakukan oleh para sarjana hukum (legal scholars)*.

Perkembangan-perkembangan tersebut mau tidak mau harus menjadi perhatian baik di lingkungan akademis maupun praktis guna memperoleh pemahaman tentang kondisi aktual tentang apa hukum yang berlaku pada saat ini (*lex posterior derogat lex priori*) dan apakah interpretasi-interpretasi yang dibangun baik oleh praktisi maupun teoretisi tersebut sudah tepat ataukah belum. Perkembangan-perkembangan tersebut juga menjadi satu keniscayaan bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar. Terkait dengan itu maka penerbitan Refleksi Hukum April 2009 mengambil tema “Perkembangan-perkembangan Mutakhir dalam Hukum Indonesia (*Recent Developments in Indonesian Law*).”

Ada lima artikel utama dan satu timbangan buku dalam terbitan Refleksi Hukum kali ini. Pertama, Mahkamah Konstitusi dan HAM: Masalah Pidana Mati oleh Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (Hakim Konstitusi & Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi). Kedua, Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional oleh Arie Siswanto, S.H., M.Hum (Staf Pengajar FH-UKSW). Ketiga, Implementasi Lisensi Wajib Terhadap Produk Obat yang Dipatenkan Pasca Deklarasi Doha oleh Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.D (Staf Pengajar FH Univ. Janabadra). Keempat, Peran Ombudsman dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Warga Masyarakat (Staf Pengajar FH-UKSW). Kelima, Hal-hal yang Mempengaruhi Terjadinya Kasus Korupsi Pengadaan Buku Ajar Tahun 2003 di Kota Salatiga dan Penanganannya. Sementara timbangan buku adalah tentang Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara.

Artikel pertama dan kedua merupakan tulisan yang semula disajikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh FH-UKSW pada tanggal 21 Februari 2009 dengan mengambil tema “Legalisasi Pidana Mati dan Tuntutan Membangun Masyarakat Humanis di Indonesia: Peranan MK.” Kedua tulisan ini membahas mengenai kontroversi pemberlakuan pidana mati di Indonesia yang sedang menghangat setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-undang Narkotika. Artikel pertama membahas mengenai perspektif Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian konstitusionalitas pidana mati. Artikel kedua membahas aspek-aspek hukum internasional yang berkaitan dengan pidana mati.

Artikel ketiga membahas perkembangan mutakhir pengaturan internasional di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) menyangkut kebijakan *safeguard* yang dapat dijalankan negara berkembang berkenaan dengan obat esensial melalui instrumen lisensi wajib (*compulsory licenses*). Penulis artikel ini menyimpulkan bahwa amandemen perjanjian TRIPS pada tahun 2005 merupakan lambang keberhasilan yang nyata dari usaha negara berkembang untuk mendapatkan status hukum yang kokoh terhadap keterkaitan antara perlindungan paten obat dengan akses masyarakat terhadap obat esensial. Perkembangan demikian tentu akan berpengaruh pula terhadap pengaturan hukum nasional Indonesia.

Artikel keempat membahas mengenai peran Ombudsman dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat di Indonesia. Artikel ini membahas perkembangan mutakhir tentang legislasi yang menjadi dasar pembentukan dan bekerjanya Ombudsman Republik Indonesia yaitu UU No. 37 Tahun 2008. Penulis artikel ini berpendapat bahwa kehadiran Ombudsman di Indonesia sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam rangka melakukan pengawasan terhadap layanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang dilakukan di lingkungan BUMN, BUMD dan BHMN.

Artikel kelima membahas tentang perkembangan dalam penanganan kasus korupsi dalam proyek pengadaan buku ajar (kasus Buku Balai Pustaka) di Kota Salatiga pada tahun 2003. Artikel ini menyajikan analisis tentang kuatnya pengaruh politik dalam kasus pengadaan buku tersebut. Artikel ini melihat bahwa proses hukum yang tengah berjalan tidak mempertimbangkan faktor politik tersebut. Oleh karena itu penulis merekomendasikan supaya aktor intelektual dari kasus ini juga harus dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan keterlambatan dalam memenuhi *deadline* penerbitan edisi April 2009, kami Dewan Redaksi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca.



MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAM: MASALAH PIDANA MATI¹

A. Mukthie Fadjar²

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) has a fundamental role in addressing human rights issue in Indonesia. As the guardian of the constitution, MK should protect human rights provision under Chapter XA of the UUD 1945. In order to complete its function, MK has an authority to invalidate unconstitutional legislation by judicial review mechanism. A legislation can be declared unconstitutional if it violates human rights provision of the UUD 1945. The problematic of judicial review of human rights in Indonesia is the vague relationship between Art. 28I.1 and Art. 28J.2 of the UUD 1945. The author suggests that Art. 28J.2 the UUD 1945 can not be utilized as an ultimate tool to derogate Art. 28I.1 of the UUD 1945. But in the capital punishment constitutionality case the author thinks that it should be a matter of legal policy of the government as a legislator which can not be intervened by MK.

Keywords: Mahkamah Konstitusi; Human Rights; Capital Punishment

¹ Disampaikan dalam Seminar Nasional "Legalisasi Pidana Mati dan Tuntutan Membangun Masyarakat Humanis di Indonesia: Peranan MK", diselenggarakan oleh FH Universitas Kristen Satya Wacana (FH-UKSW), bertempat di Gedung E-123 UKSW, pada tanggal 21 Februari 2009.

² Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. adalah Hakim Konstitusi/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.